

BAB II

ILO DAN STRATEGI DALAM MENGATASI PERMASALAHAN PEKERJA ANAK

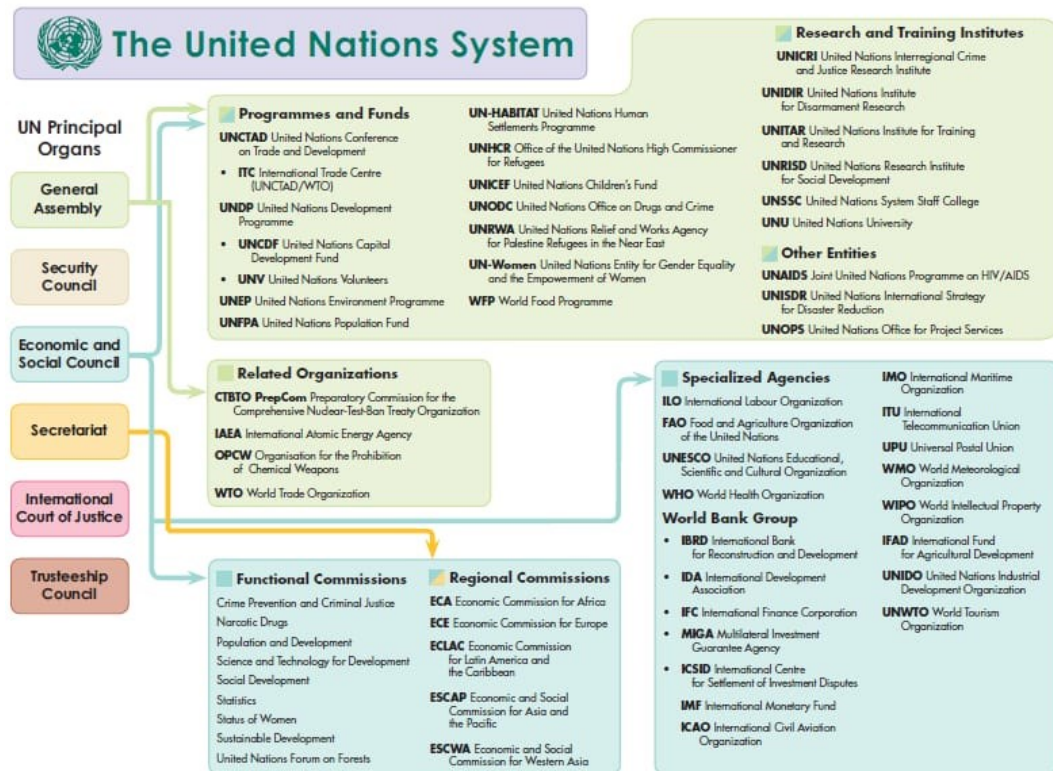
2.1 Gambaran Umum Organisasi Internasional ILO

International Labour Organization (ILO) adalah organisasi internasional yang menjadi bagian dari badan-badan khusus PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang berkedudukan pusat di Jenewa dan bertanggung jawab untuk menyusun dan mengawasi standar dan kebijakan ketenagakerjaan internasional. ILO merupakan salah satu organisasi tertua yang menjadi bagian PBB dimana pada masa itu masih dalam bentuk Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yang dibentuk pasca perang dunia I karena ILO didirikan pada tahun 1919 dan menjadi bagian dari perjanjian Versailles yang menandai berakhirnya perang dunia I.⁴³ ILO juga merupakan organisasi HAM paling penting dibidang ekonomi dan ketenagakerjaan. Pada awal didirikan, ILO memiliki 15 anggota yang berasal dari 9 negara. Dari 9 negara tersebut, 5 negara diperkenankan mengirimkan delegasi sebanyak 2 orang dari masing-masing negara sedangkan 4 negara mengirimkan 1 delegasi. Negara-negara tersebut merupakan bagian dari Komisi Perburuhan dan dibentuk pada saat Konferensi Perdamaian.⁴⁴ Berikut adalah struktur organisasi PBB dimana ILO termasuk di dalamnya.

⁴³ Cici Valensy, 2017, *Peran International Labour Organization (ILO) Dalam Melindungi Buruh Migran Indonesia Di Arab Saudi Tahun 2012-2016*, JOM FISIP Vol. 4 No. 2 - Oktober 2017

⁴⁴ Antony Alcock, 1971, *History of The International Labour Organization*, Palgrave Macmillan

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PBB



(Sumber: Dictio.id)

Dalam gambar tersebut dapat dilihat jika setelah LBB dibubarkan dan PBB didirikan, ILO menjadi badan khusus PBB di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial/*Economy and Social Council* dalam struktur organisasi PBB bersama dengan badan khusus PBB lainnya seperti FAO, WHO, UNICEF, dan sebagainya.

Pembentukan ILO berdasarkan pada keyakinan bahwa perdamaian yang universal dan abadi hanya dapat dicapai bila didasari pada keadilan sosial. Selain itu, terdapat alasan politis dan ekonomi yang mendasari pembentukan ILO. Alasan politisnya yaitu jika tidak ada perbaikan terhadap kondisi pekerja yang jumlahnya terus

bertambah sebagai dampak dari industrialisasi, hal tersebut dapat menimbulkan ketegangan sosial yang mempengaruhi harmoni dan kedamaian dunia. Sedangkan alasan ekonomi pembentukan ILO yaitu sebuah industry akan menghadapi kesulitan jika tidak menjalin hubungan yang baik dengan pekerjaanya. Baik negara maupun pihak lain yang tidak memperlakukan pekerja tidak sebagaimana mestinya akan mendapat tekanan dari dunia internasional.⁴⁵

Konstitusi ILO dirancang antara bulan Januari hingga April pada tahun 1919 oleh Komisi Perburuhan yang dibentuk dalam Konferensi Perdamaian yang pertama kali diselenggarakan di Paris. Komisi tersebut terdiri dari sembilan perwakilan negara meliputi Belgia, Kuba, Cekoslowakia, Prancis, Italia, Jepang, Polandia, Inggris, dan Amerika Serikat yang dipimpin oleh Samuel Gompers, kepala Federasi Amerika Tenaga Kerja (AFL).⁴⁶ Para pendiri ILO telah berkomitmen untuk memasyarakatkan kondisi kerja yang manusiawi serta memerangi ketidakadilan, penderitaan dan kemiskinan. Pada saat terjadi krisis di pertengahan Perang Dunia II pada tahun 1944, para anggota ILO membangun tujuan-tujuan ini dengan menerapkan Deklarasi Philadelphia, yang menyatakan bahwa pekerja bukanlah komoditas dan menetapkan hak asasi manusia (HAM) dan hak ekonomi berdasarkan prinsip yang menyatakan bahwa “kemiskinan akan mengancam kesejahteraan dimana-mana.”⁴⁷ Pertemuan

⁴⁵ Mounfred Nowak, 2003, *Pengantar Pada Rezim HAM Internasional*, Leiden: Brill Academic Publisher

⁴⁶ Cici, *Loc.Cit*

⁴⁷ *History of the ILO*, ILO, diakses dalam <https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--en/index.htm> (10/01/19. 21.12)

tersebut dihadiri oleh perwakilan pemerintah, pengusaha, dan buruh sesuai dengan system tripartite ILO dari 41 negara anggota.⁴⁸

Peristiwa ini menjadi tonggak bagi ILO untuk mendefinisikan kembali sasaran, tujuan, dan prinsip-prinsip ILO yang tercantum dalam konstitusi ILO yang meliputi:

- 1). Tenaga kerja bukan komoditi mengandung artian bahwa tenaga kerja manusia bukan barang dagangan untuk diperjual belikan selayaknya benda mati. Hal ini juga untuk menghindari perdagangan manusia
- 2). Kebebasan mengeluarkan pendapat dan berserikat, mengandung makna dalam mendorong meningkatkan kemajuan
- 3). Kemiskinan merupakan hal yang berbahaya bagi kemakmuran karena kemiskinan akan menciptakan kesenjangan dalam masyarakat dan dapat mengakibatkan berbagai permasalahan sosial.
- 4). Semua umat manusia, terlepas dari ras, kepercayaan, dan jenis kelamin berhak atas kehidupan yang layak baik materiil maupun spiritual dalam keadaan bebas dan bermartabat, jaminan ekonomi dan kesempatan yang sama.⁴⁹

Kemudian, ILO menjadi lembaga spesialis pertama di bawah PBB yang baru terbentuk pada tahun 1946.⁵⁰ Sedangkan tujuan utama dari ILO yaitu mempromosikan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif, dalam kondisi kebebasan, keadilan, keamanan dan martabat manusia.⁵¹

⁴⁸ Nobelprice.org, *Award Ceremony Speech*, melalui http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1969/press.html (10/01/19. 21.30)

⁴⁹ *Sekilas ILO di Indonesia*, ILO diakses dalam <https://www.ilo.org/public/indonesia/region/asro/jakarta/download/faktailojkt.pdf> (10/01/19. 22.01)

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ *Ibid*

Untuk mencapai tujuan tersebut, ILO menggunakan empat kunci sasaran yang meliputi: 1). Mempromosikan dan mewujudkan prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja 2). Menciptakan kesempatan yang lebih besar bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pekerjaan yang layak 3). Meningkatkan cakupan dan keefektifan perlindungan sosial untuk semua dan 4). Memperkuat tripartisme dan dialog sosial.⁵² Empat kunci sasaran ini diimplementasikan melalui sebuah agenda kerja yang merefleksikan prioritas pada kehidupan sosial, ekonomi, dan agenda politik setiap negara dan 41 system internasional yang disebut sebagai *Decent Work Agenda* (Agenda Pekerjaan Layak) yang menjadi prioritas kerja utama ILO.⁵³

Selanjutnya, pada tahun 1998 diselenggarakan konferensi perburuhan Internasional dimana para delegasi yang menghadiri konferensi ini mengadopsi deklarasi ILO tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja. Prinsip dan hak yang dimaksudkan dalam konvensi adalah 41 system 41 i kebebasan berserikat dan perundingan bersama serta penghapusan pekerjaan untuk anak, kerja paksa, dan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Berdasarkan deklarasi ini, jaminan atas prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja merupakan hal penting karena memungkinkan masyarakat “untuk menuntut secara bebas dan atas dasar kesetaraan peluang, bagian mereka yang adil atas kekayaan yang ikut mereka hasilkan dan untuk menggali potensi mereka sepenuhnya sebagai manusia”. Selanjutnya, dengan

⁵² *Ibid*

⁵³ *Decent Work Agenda*, ILO diakses dalam <http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/lang--en/index.htm> (10/01/19. 22.15)

ditetapkannya deklarasi ini, negara-negara anggota ILO memutuskan untuk memberlakukan serangkaian standar ketenagakerjaan pokok yang merupakan bentuk dasar HAM dan inti dari pekerjaan yang layak.⁵⁴

Sama seperti organisasi pada umumnya, ILO memiliki visi dan misi yang menjadi landasan bagi ILO untuk menjalankan fungsinya sebagai organisasi internasional yang menangani permasalahan ketenagakerjaan. Visi ILO berasaskan pada kondisi manusiawi para pekerja sebagai ungkapan atas keadilan sosial dan kondisi perdamaian diantara bangsa-bangsa. Visi ini berakar dalam nilai-nilai organisasi dan struktur tripartisme yang membentuk ILO.⁵⁵ Sedangkan misi ILO adalah bergerak dengan membantu memajukan penciptaan pekerjaan yang layak, kondisi kerja dan ekonomi yang memberi buruh-buruh dan pengusaha sebuah kepastian dalam memperoleh perdamaian abadi; mengejar pendiriannya bahwa perdamaian tenaga kerja penting untuk perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan setiap bangsa.⁵⁶

Dalam menjalankan perannya sebagai organisasi internasional yang berfokus pada permasalahan ketenagakerjaan, ILO memiliki struktur yang unik dibandingkan dengan organisasi internasional lainnya yang berada dibawah naungan PBB karena ILO menggunakan system 42system42ite dimana dalam system ini terdapat konsolidasi dari

⁵⁴ Sekilas tentang ILO, *Loc.Cit*

⁵⁵ The Bureau of Programming and Management, 2009, *ILO Vision & Prioritas 2010 – 15: Making Decent Work Happen*, ILO, melalui <http://www.ilo.org/public/english/bureau/program/download/pdf/spf1015/brochure.pdf> (10/01/19. 22.16)

⁵⁶ *Mission and Objectives*, ILO, diakses dalam <https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--en/index.htm> (10/01/19. 22.21)

ketiga unsur yang terdiri dari pekerja, pengusaha dan pemerintah. Dalam system ini, perwakilan pengusaha dan pekerja memiliki kedudukan yang setara dengan pemerintah dalam membentuk program dan kebijakan. Ketiga unsur ini berbagi jatah, yaitu 2 suara untuk pemerintah, 1 suara untuk pekerja, dan 1 suara untuk pengusaha. Oleh karena itu, system tripartite ini juga disebut sebagai system 2-1-1. Sistem tripartite ini diharapkan dapat mempromosikan kemitraan sosial antara buruh dan pengusaha yang terlibat dalam organisasi dengan pemerintah di negara-negara anggota organisasi.

Keanggotaan ILO mencakup perwakilan pihak non-pemerintah yaitu perwakilan pekerja dan pengusaha sehingga ILO memiliki unit tersendiri yang mewakili kedua unsur tersebut. Unit yang mewakili unsur pekerja yaitu *Bureau for Workers Activities* (ACTRAV) yang bertujuan memperkuat perwakilan pekerja yang mandiri dan demokratis di semua negara yang memberikan mereka kemungkinan dan kesempatan untuk memainkan peran mereka secara efektif dalam melindungi hak-hak dan kepentingan pekerja serta untuk mempromosikan ratifikasi dan implementasi Konvensi ILO. ACTRAV bertugas mengkoordinasi semua kegiatan yang berhubungan buruh dan organisasi mereka baik di kantor pusat maupun di lapangan dengan *International Labour Office*.⁵⁷

Sementara itu perwakilan pihak pengusaha berada di bawah naungan *Bureau for Employer's Organization* (ACT/EMP) yang memiliki tugas dan fungsi yang hampir

⁵⁷ About ACTRAV, ILO, diakses dalam <http://www.ilo.org/actrav/about/lang--en/index.htm> (10/01/19. 22.34)

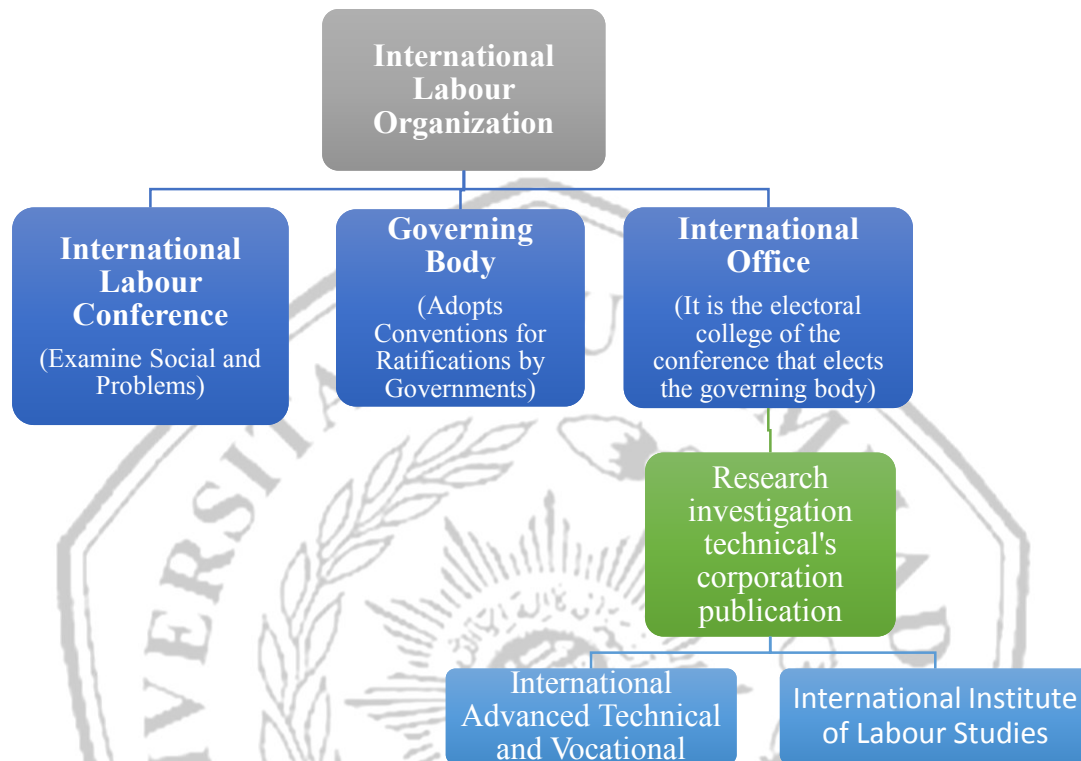
sama dengan ACTRAV yaitu menjaga hubungan dekat dengan organisasi pengusaha dalam negara anggota ILO. Selain itu jugam untuk memaksimalkan sumber daya ILO untuk pihak pengusaha dan menjaga ILO agar terus memberikan perhatian terhadap pandangan dan prioritasnya. Biro ini juga menjalankan program kerjasama teknis dengan organisasi pengusaha di negara-negara berkembang dengan memberikan bantuan terhadap organisasi di negara-negara tersebut.⁵⁸

ILO memiliki tiga badan utama yang meliputi *Governing Body*, *International Labour Office*, dan *International Labour Conference* dimana *Governing Body* atau Dewan Eksekutif ILO menjadi pedoman dasar bagi ILO untuk menjalankan roda organisasi. *Governing Body* ILO terdiri dari 5 anggota trituler yang terdiri dari 28 wakil pemerintahan, 14 wakil pengusaha, dan 14 wakil pekerja /buruh yang bertugas mengambil keputusan mengenai tindakan yang akan mempengaruhi kebijakan ILO, mempersiapkan rancangan program dan anggaran, kemudian serahkan kepada *International Labour Conference* untuk disetujui.⁵⁹

⁵⁸ *Employer's Organization*, ILO diakses dalam <http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/who-we-are/tripartite-constituent/lang--en/index.htm> (10/01/19. 22.56)

⁵⁹ *About the Governing Body*, ILO diakses dalam <http://www.ilo.org/gb/about-governing-body/lang--en/index.htm> (11/01/19. 16.03)

Gambar 2.2 Struktur Organisasi ILO



(Sumber: Diolah oleh penulis dari berbagai sumber)

Terdapat dua produk hukum dari ILO berdasarkan Pasal 19 ayat (1) konstitusi ILO yaitu konvensi (*convention*) dan rekomendasi (*recommendation*). Penentuan produk hukum ini tergantung pada ruang lingkup atau konteks dari subjek yang dibahas dan diperlukan minimal dua pertiga suara delegasi yang hadir untuk menentukan.⁶⁰ Perbedaan antara kedua produk hukum tersebut yaitu konvensi dimaksudkan untuk diratifikasi dan terdapat kewajiban hukum yang mengikat, sedangkan rekomendasi

⁶⁰ Asri Wijayanti, 2012, *Sinkronisasi Hukum Perburuhan terhadap Konvensi ILO*, Bandung

tidak dimaksudkan untuk diratifikasi dan tidak mengikat. Rekomendasi hanya dimaksudkan untuk memberikan petunjuk terhadap perumusan kebijakan nasional dan tidakannya.⁶¹ Selain kedua produk hukum diatas, produk hukum ILO yang lainnya yaitu Deklarasi ILO Mengenai Prinsip Dan Hak-Hak Dasar Di Tempat Kerja tahun 1998 seperti yang telah di jelaskan sebelumnya.

ILO mengalami peningkatan jumlah keanggotaan pasca perang dunia II yang dipicu dengan meningkatnya jumlah negara-negara yang baru merdeka dan terjadi perubahan besar karena negara industri menjadi negara minoritas diantara negara berkembang dan anggaran biaya bertambah lima kali lipat.⁶² Hingga kini sebanyak 187 negara telah menjadi anggota ILO. Kondisi ini kemudian mengakibatkan ILO sebagai organisasi internasional meluncurkan program-program bantuan teknis untuk meningkatkan keahlian dan memberikan bantuan kepada pemerintah, pekerja dan pengusaha di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang sedang berkembang ⁶³. Sejak awal tahun 1950-an, ILO telah memberikan bantuan teknis untuk negara-negara di dunia pada semua tahap ekonomi. Rata-rata dana yang dihabiskan untuk proyek kerjasama tiap tahunnya dalam dekade terakhir yaitu sebesar 130 juta US\$. Proyek kerjasama tersebut dilakukan antara negara pemberi bantuan, negara penerima bantuan, dan ILO. ⁶⁴

⁶¹ Sentonoe Kertonegoro,1998, *Kebebasan Berserikat (freedom of associatioan)*, YTKI, hal.3-4

⁶² Nobelprice.org, *Loc.Cit*

⁶³ Sekilas tentang ILO di Indonesia, *Loc.Cit*

⁶⁴ Cici Valensy, *Loc.Cit*

Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yang menjadi perhatian ILO antara lain yaitu kerja paksa, diskriminasi, masalah ketenagakerjaan migrasi Internasional, dan juga pekerja anak. Sejarah ILO menunjukkan bahwa organisasi ini berkontribusi banyak dalam penegakkan hak pekerja, terlebih lagi konvensi dan rekomendasi ILO yang berisi acuan untuk mengatasi permasalahan pekerja, salah satunya yaitu *child labour*⁶⁵. Dengan demikian, terlihat dari dasar konvensi tersebut, ILO menunjukkan bahwa *child labour* termasuk dalam subjek permasalahan yang harus diatasi.

2.2 Upaya ILO Dalam Mengatasi Permasalahan Pekerja Anak

Secara garis besar, upaya ILO dalam mengatasi permasalahan pekerja anak dapat di bagi menjadi dua, yaitu melalui produk hukum ILO yang berupa konvensi dan rekomendasi serta tindakan yang berupa pembentukan program-program yang bertujuan untuk menghapuskan pekerja anak. Upaya ILO berupa tindakan dimulai pada awal tahun 1990an, saat ILO menjalankan sebuah program investigasi di 220 negara dengan menggunakan metodologi survey khusus yang meliputi survey instrument, definisi, dan klasifikasi. Hasil dari survey tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 1996, negara-negara berkembang melibatkan anak-anak secara aktif dalam kegiatan ekonomi baik dalam kawasan maupun dalam level global.

⁶⁵ *International Labour Organization – History Organization*, Nobelprice.org, tersedia dalam <https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1969/labour/history/> (11/01/19. 16.56)

Terdapat 250 juta anak-anak berusia 5-14 tahun yang terlibat dalam aktivitas ekonomi di seluruh dunia. Setidaknya sebanyak 120 juta merupakan pekerja *full time*, sedangkan sisanya mengkombinasikan antara bekerja dan bersekolah.⁶⁶ Pada tahun 1998-1999, Gerakan Global Melawan Pekerja Anak yang didukung oleh IPEC mengembangkan sebuah jaringan global bagi aktor politik dan aktivis di berbagai negara serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap isu pekerja anak. Selain itu, pada tahun 1999 IPEC juga menjalankan program kampanye advokasi global yang bertujuan untuk meningkatkan dukungan terhadap upaya melawan pekerja anak dan dukungan untuk ratifikasi Konvensi 182.⁶⁷ Kedua gerakan tersebut menjadi penanda bahwa fenomena pekerja anak di bawah umur menjadi permasalahan global yang menjadi sorotan dalam dunia internasional.

Fenomena pekerja anak dibawah umur merupakan permasalahan global yang kompleks dan rumit karena permasalahan ini menyangkut hak asasi manusia yang merupakan hak dasar yang mutlak dimiliki oleh setiap manusia. Anak-anak yang menjadi korban pekerja anak dapat kehilangan haknya terhadap pendidikan, kesehatan, jaminan keamanan, dan sebagainya. Ketua Komite Pekerja Anak PBB, Folks Hommer mendefinisikan pekerja anak sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak yang dapat mengganggu perkembangan fisik mereka dan mengurangi peluang mereka dalam

⁶⁶ *IPEC Action Againsts Child Labour: Achievements, lessons learned and indications for future*, 1999, Geneva: SRO-Kundig hal. 11

⁶⁷ *Ibid*

pendidikan yang mereka jalani.⁶⁸ Sedangkan menurut ILO, pekerja anak merupakan sebuah pekerjaan yang dilakukan yang bukan angkatan kerja mereka dan masih menempuh pendidikan yang formal dan mengganggu kesejahteraan anak dan mengganggu pendidikan mereka.⁶⁹

Selanjutnya, yang dimaksud dengan anak berdasarkan pada Konvensi ILO no. 182 tentang Pelarangan dan Penghapusan Segera Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yaitu setiap anak yang berusia dibawah 18 tahun, di bawah 12 tahun yang telah terlibat dalam aktivitas ekonomi, dan semua anak yang berada di umur 12-14 tahun yang melakukan pekerjaan berat yang dianggap dapat membahayakan jiwa mereka baik secara jasmani, rohani, maupun secara seksual.⁷⁰ Jenis-jenis pekerjaan tersebut antara lain yaitu pekerjaan di bidang pertanian, pekerjaan rumah tangga, tambang dan galian, perbudakan dan kerja paksa, tekstil dan garmen, dan sebagainya. Pekerja anak dapat mempengaruhi mental, psikis, bahkan merusak moral pada anak seusianya karena anak dihadapkan pada suatu pekerjaan dan beban yang berat dan memaksa mereka untuk meninggalkan pendidikan sebelum waktunya. Permasalahan pekerja anak ini tidak hanya terjadi di negara berkembang, namun juga di negara-negara maju. Oleh karena itu, permasalahan ini menjadi permasalahan global yang

⁶⁸ Divya Bhargava, *Child Labour – A Hindrance in Development* melalui website <http://www.countercurrents.org/bhargava090709.html> (11/01/19. 17.00)

⁶⁹ Richard Anderson Sinaga, 2015, Peran ILO(International Labour Organization) Dalam Mengatasi Pekerja Anak (Child Labour) Di Brazil (2008-2013), JOM FISIP Volume 2 No. 2 Oktober 2015

⁷⁰ Junpa Marpaung, 2018, Peran ILO dalam melindungi Pekerja Anak di Thailand tahun 2010-2014, JOM FISIP Vol. 5 No.1 April 2018 hal.4

kompleks dan membutuhkan kerjasama dari berbagai aktor dalam hubungan internasional untuk mengatasinya.

Berdasarkan data ILO, terdapat lebih dari 200 juta anak yang bekerja di seluruh dunia, dengan sebagian besar dari mereka bekerja paruh waktu. Para anak-anak yang menjadi korban pekerja anak tersebut kehilangan hak-hak mereka untuk memperoleh pendidikan yang memadai, kesehatan yang baik, dan kebebasan. Bahkan sebanyak 126 juta dari mereka terekspos dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk dan berbahaya untuk anak yang mengancam fisik, mental, dan moral seperti yang sudah disinggung sebelumnya. Sebagai organisasi internasional yang menangani permasalahan ketenagakerjaan ILO melihat urgensi permasalahan pekerja anak berbagai upaya telah dilakukan ILO untuk mengatasi permasalahan pekerja anak, dimulai sejak tahun 1973 pada saat ILO mengeluarkan Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja yang kini telah diratifikasi oleh 80 persen negara anggota.⁷¹ Konvensi ini merupakan salah satu konvensi yang melindungi hak asasi anak dan menetapkan bahwa usia minimum anak-anak dapat mulai bekerja adalah tidak boleh di bawah usia wajib belajar dan tidak kurang dari 15 tahun, dan terdapat pengecualian bagi negara-negara berkembang.⁷²

Selanjutnya, pada tahun 1999 ILO mengeluarkan Konvensi ILO No. 138 tentang pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan

⁷¹ Sekilas ILO di Indonesia, *Loc.Cit*

⁷² *Child Labour in India*, ILO, tersedia dalam https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-new_delhi/documents/publication/wcms_557089.pdf (11/01/19. 17.50)

Terburuk Untuk Anak yang telah diratifikasi oleh 90 persen negara anggota ILO. bertujuan untuk segera menghilangkan segala bentuk terburuk dari adanya eksploitasi pekerja anak. Konvensi ini memuat melarang pekerjaan berbahaya yang kemungkinan akan mengancam mental, fisik, dan moral anak.⁷³ Hal tersebut menunjukkan bahwa ILO telah menjadi motor penggerak utama terhadap upaya penghapusan pekerja anak. Kedua konvensi ini menjadi dasar hukum bagi ILO dalam upaya mengatasi permasalahan pekerja anak.

Untuk mendukung pelaksanaan kedua konvensi yang telah disebutkan diatas, ILO juga menjalankan seperangkat kegiatan atau mekanisme (identifikasi, rujukan, dll) yang menjadi salah satu cara yang paling ampuh untuk mengatasi pekerja anak yang disebut dengan *Child Labour Monitoring* (CLM). CLM adalah proses aktif yang memastikan terlaksananya dan terkoordinasinya pemantauan terhadap pekerja anak dengan memeriksa tempat-tempat dimana anak perempuan maupun laki-laki mungkin sedang bekerja baik di sector formal seperti pabrik, industri rumah tangga, pertambangan berskala kecil, kapal (penangkap) ikan, maupun di sector informal seperti di stasiun bis, pasar, pelabuhan, dan sebagainya. Kegiatan ini berdasarkan pada Pasal 5 Konvensi ILO No. 182 yang menyerukan pembentukan mekanisme yang tepat untuk memantau ketentuan-ketentuan Konvensi tersebut.⁷⁴

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ IPEC, 2008, *Garis Besar Pemantauan Pekerja Anak*, Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional

Kegiatan-kegiatan utama CLM sendiri meliputi pengamatan langsung, identifikasi, dan verifikasi/pengecekan. Pengamatan langsung dilakukan berulang kali secara teratur untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi oleh pekerja anak serta menghubungkan pekerja anak yang telah teridentifikasi tersebut dengan pelayanan-pelayanan yang sesuai bagi mereka. Kemudian, melakukan verifikasi untuk membuktikan bahwa pekerja anak tersebut telah sepenuhnya terlepas dari kegiatan pekerja anak dengan melacak kegiatan mereka selanjutnya.⁷⁵

Selain kedua konvensi tersebut, ILO juga mengeluarkan rekomendasi ILO no. 71 tentang Organisasi Ketenagakerjaan dalam transisi dari perang ke perdamaian sebagai salah satu upaya untuk melindungi anak-anak menjadi pekerja anak dalam konflik dan bencana. Konflik dan bencana yang menghancurkan kehidupan mengakibatkan kondisi perekonomian memburuk sehingga banyak keluarga yang jatuh dalam kemiskinan. Hal ini mengakibatkan anak-anak seringkali tidak memiliki pilihan selain berhenti sekolah dan bekerja untuk kelangsungan hidup mereka dan keluarganya.⁷⁶ Adanya pekerja anak dalam konflik dan bencana merupakan pelanggaran hukum internasional serta pelanggaran terhadap hak asasi anak. ILO juga menjalin berbagai kerjasama strategis dengan dalam upayanya mengatasi permasalahan pekerja anak dalam konflik dan bencana. Salah satunya yang akan

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ *ILO Pekerja Anak Dalam Konflik dan Bencana*, 2017, tersedia dalam https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_559204.pdf (12/03/19. 21.03)

dibahas dalam penelitian ini yaitu upaya ILO dalam mengatasi pekerja anak pengungsi Suriah melalui kerangka kerja 3RP yang merupakan sebuah plan yang dikembangkan oleh negara-negara *host country* pengungsi Suriah antara lain yaitu Mesir, Irak, Yordania, Lebanon, dan Turki seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Selain melalui konvensi-konvensi diatas, upaya ILO lainnya yaitu dengan meluncurkan Program Internasional untuk Penghapusan Pekerja Anak (*International Programme on the Elimination of Child Labour/IPEC*) pada tahun 1992 yang merupakan program donor tunggal terbesar yang diluncurkan ILO secara global dimana pada saat ini telah beroperasi di 90 negara di Asia, Africa, Amerika Latin, dan Eropa. Sebanyak 37 negara telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan IPEC dan 30 negara terlibat dalam program IPEC seperti yang tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.3 Daftar Negara yang Menandatangani MoU dan yang Berasosiasi dengan IPEC

Region	Countries that have signed the MOU	Countries Associated with IPEC
Afrika	Benin, Burkina Faso, Mesir, Kenya, Masgaskar, Mali, Senegal, Afrika Selatan, Uganda, Tanzania	Burundi, Kamerun, Chad, Ethiopia, Gabon, Malawi, Maroko, Niger, Rwanda, Togo, Zambia, Zimbabwe
Arab States		Yordania, Lebanon, Suriah, Yaman

Asia	Bangladesh, Kamboja, India, Indonesia, Nepal, Mongolia, Pakistan, Filipina, Sri Lanka, Thailand	Cina, Vietnam, Laos
Europe	Albania, Turki	Georgia, Kirgistan, Rumania, Rusia, Ukraina
Latin America and the Caribbean	Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Kosta Rika, Republik Dominika, Ekuador, El Salvador, Guetamala, Honduras, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Venezuela	Kolombia, Haiti, Meksiko, Uruguay

(Sumber: IPEC Action Againts Child Labor)

Selain negara-negara diatas, IPEC juga memiliki 19 negara dan 4 organisasi donor yang dapat dilihat dalam tabel berikut.⁷⁷

Tabel 2.4 Negara dan Organisasi Donor IPEC

Tahun	Negara dan Organisasi Donor
1991	Jerman
1992	Belgia
1995	Australia, Prancis, Norwegia, Spanyol, Amerika Serikat
1996	Kanada, Denmark, Italy, Luxemburg, Belanda, Switzerland,
1997	Badan Eksekutif Uni Eropa (<i>European Commission</i>), Italian Social Partner Initiatives, Inggris,

⁷⁷ Ibid

1998	Austria, Jepang, Polandia, Japanese Trade Union Confederation (RENGO)
1999	Swedia, Comunidad Autonomade Madrid

(Sumber: ILO SCREAM: A Special Module on Child Labour and Armed Conflict)

Berikutnya, seperti yang disinggung sebelumnya, IPEC membentuk modul khusus SCREAM untuk memasifkan upaya menghapuskan dan mencegah permasalahan pekerja anak. Pada dasarnya, modul SCREAM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda terhadap isu pekerja anak.⁷⁸ Salah satu modul SCREAM tersebut berfokus pada permasalahan pekerja anak di daerah konflik dan situasi krisis yang dirilis pada tahun 2011.⁷⁹ Secara garis besar, modul ini berfokus terhadap pekerja anak-anak di daerah konflik yang terlibat dalam aktivitas militer seperti tentara anak, dan juga bentuk pekerjaan lainnya yang melibatkan anak-anak di medan perang misalnya anak-anak yang dipekerjakan sebagai tukang masak di kamp prajurit atau sebagai pengirim pesan. Penggunaan anak-anak oleh angkatan atau kelompok bersenjata merupakan salah satu pelanggaran paling berat terhadap hak-hak anak.⁸⁰

⁷⁸ ILO, 2010, *SCREAM: A Special Module on Child Labour and Armed Conflict*, Italy: International Training Centre of the ILO

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ *Ibid*

Namun, dalam mengatasi permasalahan pekerja anak pengungsi Suriah, ILO tidak menggunakan IPEC maupun modul SCREAM tetapi menggunakan kerangka kerja 3RP. Hal ini dikarenakan dalam modul SCREAM mengenai pekerja anak di daerah konflik dan situasi krisis hanya berfokus terhadap penanganan pekerja anak di daerah konflik yang terlibat dengan aktivitas militer seperti yang telah disebutkan sebelumnya dan belum memiliki kerangka kerja terakit dengan pekerja anak pengungsi yang bekerja di sector lain misalnya di sektor industry. Sedangkan di Turki, anak-anak pengungsi Suriah banyak ditemukan di sector industry garment dan tekstil. Oleh karena itu, ILO kemudian tidak menggunakan IPEC serta modul SCREAM melainkan membentuk program-program untuk mengatasi permasalahan pekerja anak Suriah di Turki di bawah kerangka kerja 3RP.

2.3 ILO di Turki

Sejak berdiri pada tahun 1919 sebagai salah satu bagian dari Perjanjian Versailles pada akhir perang dunia I, ILO mengalami perkembangan yang pesat sebagai organisasi yang berfokus pada permasalahan ketenagakerjaan yang meliputi pembentukan standar ketenagakerjaan internasional, mempromosikan keadilan dalam dunia kerja, mendorong peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial dan dialog mengenai isu-isu yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.⁸¹

⁸¹ *About the ILO Office in Ankara*, ILO, tersedia dalam <https://www.ilo.org/ankara/about-us/lang-en/index.htm> (13/01/19. 12.00)

Selanjutnya, pasca Perang Dunia II, ILO mengalami peningkatan jumlah keanggotaan. Banyak negara-negara baru yang bergabung dengan ILO. Hal ini juga dikarenakan ILO merupakan salah satu badan tertua di PBB. Turki sendiri merupakan salah satu negara yang telah bergabung menjadi negara anggota ILO pada masa awal pendirian ILO yaitu pada tahun 1932. Namun, kantor perwakilan ILO di Turki pertama kali baru didirikan pada tahun 1952 di Istanbul sebagai “Kantor Pusat Lapangan Kerja untuk Wilayah Timur Tengah”. Selanjutnya, pada tahun 1976, kantor perwakilan ILO di Turki di buka di Ankara dan di fungsikan sebagai kantor pusat ILO di Turki.⁸²

Misi kehadiran kantor perwakilan ILO di Turki yaitu untuk menjadi representasi ILO yang kuat dan proaktif dengan secara efektif terlibat dengan pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja, serta organisasi internasional lainnya secara *vis-à-vis* untuk mempromosikan pekerjaan yang layak bagi semua orang, memastikan standar, inti prioritas, kepentingan, dan kebijakan ILO dipromosikan dan disebarluaskan. Selain itu, kantor perwakilan ILO untuk Turki juga bekerja untuk mempromosikan Standar Perburuhan Internasional di Turki, mengembangkan, mengimplementasikan dan memantau program dan proyek kerja sama teknis untuk memajukan peluang kerja yang layak bagi semua, serta mengikuti dan menganalisis perkembangan sosial dan ekonomi, inisiatif legislatif dan kebijakan di Turki, dan melakukan kegiatan advokasi.⁸³

⁸² *Ibid*

⁸³ *Ibid*

Bidang-bidang yang menjadi focus kantor perwakilan ILO di Turki antara lain yaitu pekerja anak, pekerjaan yang layak, promosi ketenagakerjaan, kesetaraan dan diskriminasi, *green jobs*, serta keselamatan dalam kerja. Sedangkan program dan proyek ILO di Turki berfokus pada respon terhadap pengungsi, kesetaraan gender, pekerja anak, dialog sosial, dan pemenuhan keselamatan dan kesehatan kerja.⁸⁴

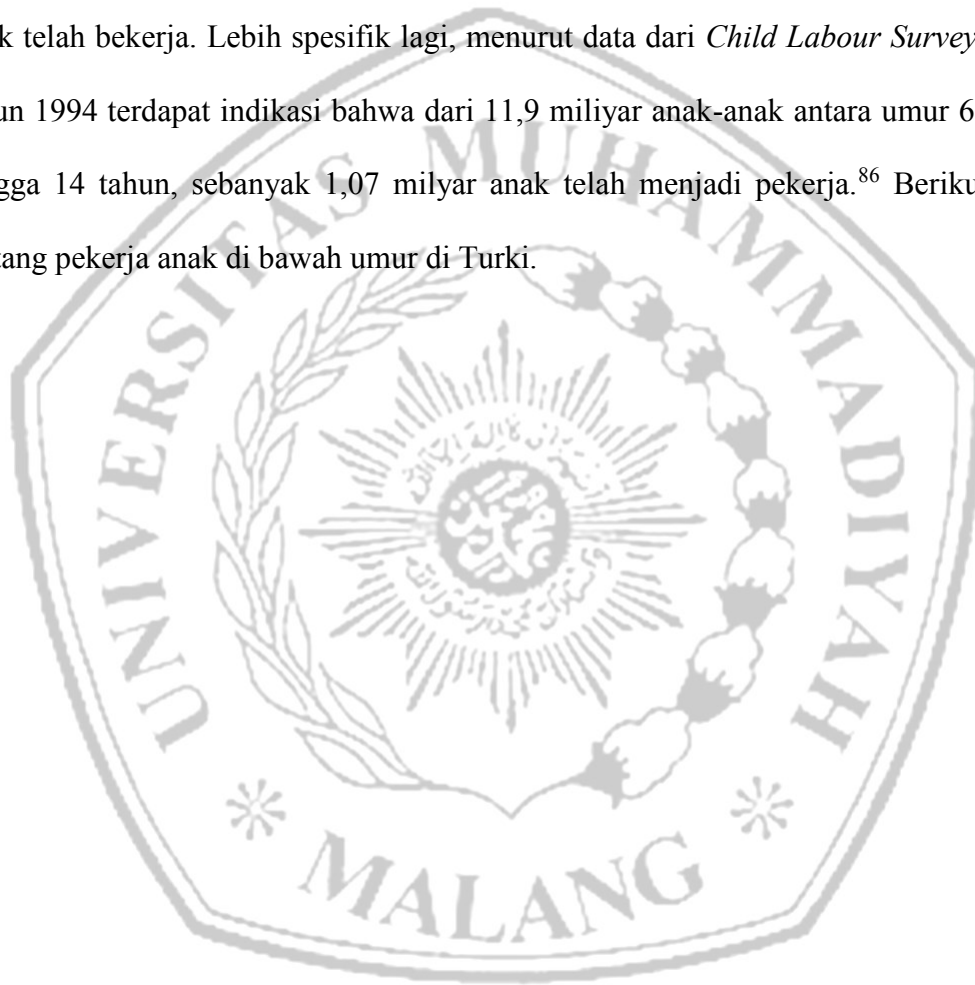
2.4 Perkembangan Permasalahan Pekerja Anak Di Turki

2.4.1 Gambaran Umum Pekerja Anak Di Turki

Permasalahan pekerja anak menjadi salah satu perhatian utama di berbagai negara di dunia baik negara berkembang maupun negara maju. Fenomena pekerja anak di bawah umur bukan menjadi hal yang baru di Turki. Kehidupan tradisional masyarakat Turki di area pedesaan selalu melibatkan anak-anak dalam pekerjaan. Contohnya, dalam kasus pekerja anak di bidang pertanian. Migrasi besar-besaran dari area pedesaan miskin menuju area perkotaan yang terjadi pada awal tahun 1950-an mengakibatkan keluarga-keluarga imigran tersebut harus menghadapi berbagai masalah seperti masalah tempat tinggal dan pekerjaan. Dalam kondisi ini, wanita dan anak-anak menjadi pihak yang paling dirugikan karena ketika para pria yang berperan sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah tidak memperoleh pekerjaan, maka wanita dan anak-anak yang harus bertanggung jawab untuk menghasilkan uang dan menjadi bagian dari angkatan kerja.

⁸⁴ *ILO Office in Turkey: Programmes and projects*, ILO, tersedia dalam <https://www.ilo.org/ankara/areas-of-work/lang--en/index.htm> (11/01/19. 13.50)

Hal ini kemudian mengakibatkan anak-anak harus dan tidak memiliki pilihan lain untuk menjadi tenaga kerja demi membantu perekonomian dan keuangan keluarganya.⁸⁵ Di pertengahan tahun 1990-an, tercatat hampir salah satu dari sepuluh anak telah bekerja. Lebih spesifik lagi, menurut data dari *Child Labour Survey*, pada tahun 1994 terdapat indikasi bahwa dari 11,9 milyar anak-anak antara umur 6 tahun hingga 14 tahun, sebanyak 1,07 milyar anak telah menjadi pekerja.⁸⁶ Berikut data tentang pekerja anak di bawah umur di Turki.



⁸⁵ Acar H, 2000, *Working Children on the streets and in the service sector*, Ankara, Turkey: Hacettepe University Institute of Social Science

⁸⁶ Duyan. V, 2005, *Relationship between the sociodemographic and family characteristic, street life experience and the hopeless of street children*, *Childhood* 12: Turkey hal. 445-459

Tabel 2.5 Data Statistik Pekerja Anak di Turki (Rentang umur tahun 6-12 Tahun),
2006-2012

Indicators	2006 ⁽¹⁾		2012	
	(October-November-December)		(October-November-December)	
	(Thousand)	(%)	(Thousand)	(%)
Population (6-17 age)	15 025	-	15 247	-
Employed (6-17 age)	890	100.0	893	100.0
Age group				
6-14	285	32.0	292	32.7
15-17	605	68.0	601	67.3
Sex				
Male	601	67.5	614	68.8
Female	289	32.5	279	31.2
Settlement				
Urban	490	55.1	400	44.8
Rural	400	44.9	493	55.2
Branch of economic activity				
Agriculture	326	36.6	399	44.7
Industry	275	30.9	217	24.3
Services	289	32.5	277	31.0
Status in employment				
Regular or casual employee	505	56.7	470	52.6
Self employed	24	2.7	10	1.1
Unpaid family worker	362	40.7	413	46.2
Employment rate (6-17 age)	-	5.9	-	5.9
6-14	-	2.5	-	2.6
15-17	-	16.6	-	15.6

⁽¹⁾ Results of the 2006 Child Labour Surveys were revised according to 2008 based population projection.

Note: Figures in table may not add up to totals due to rounding.

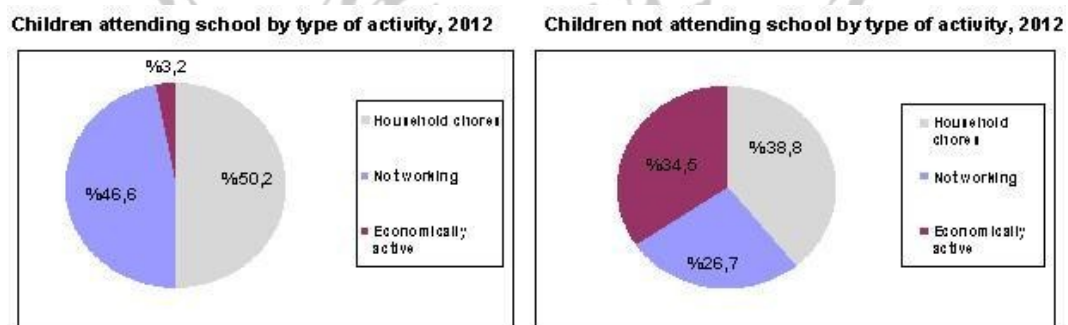
(Sumber: Turkish Statistical Institute)

Jumlah pekerja anak di bawah umur dengan rentang umur 6 tahun hingga 14 tahun adalah sebanyak 292 ribu anak dan rentang umur 15 tahun hingga 17 tahun adalah sebanyak 601 ribu anak. 44.8% pekerja anak berasal dari daerah urban atau perkotaan dan 55.2% pekerja anak adalah anak-anak yang tinggal di *rural areas* atau

pedesaan. Rasio berdasarkan jenis kelamin yaitu 68.8% adalah laki-laki dan 31.2% adalah perempuan.

Sebanyak 49,8% pekerja anak (rentang umur 6-17 tahun) masih aktif bersekolah, sedangkan 50,2 % dari mereka sudah tidak aktif bersekolah. Dalam rentang umur 6 tahun hingga 14 tahun terdapat 81,8% pekerja anak dan di rentang umur 15 tahun hingga 17 tahun tercatat 34,3% pekerja anak yang masih aktif bersekolah. Terdapat 3,2% anak-anak di rentang umur antara 6 tahun hingga 17 tahun yang masih aktif bersekolah sekaligus terlibat dalam aktivitas perekonomian, 50,2% anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan rumah tangga dan 46,6% anak-anak yang tidak bekerja. Dalam rentang umur yang sama, juga terdapat 34,5% anak-anak yang tidak bersekolah dan terlibat dalam aktivitas ekonomi, 38,8% terlibat dalam pekerjaan rumah tangga, dan 26,7% tidak bekerja.

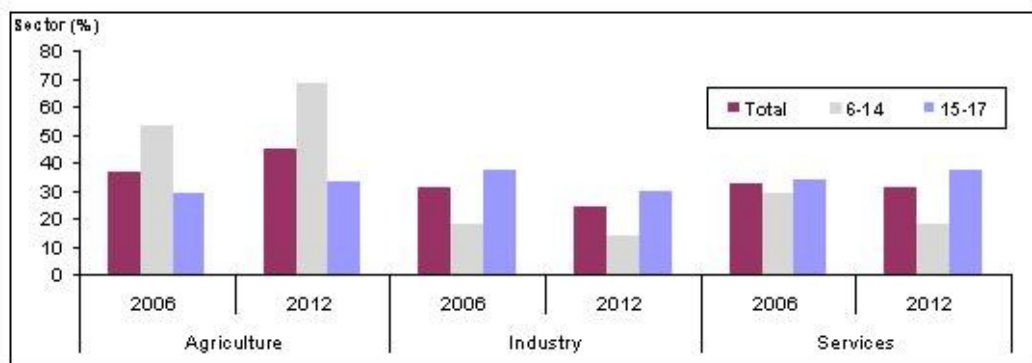
Gambar 2.6 Anak-anak yang bersekolah dan tidak bersekolah berdasarkan tipe aktivitasnya



(Sumber: Turkish Statistical Institute)

Selanjutnya, sekitar 44.7% (399 ribu anak) dari seluruh total pekerja anak terlibat di sector agrikultur, 24.3% (217 ribu anak) terlibat di sector industri, dan 31% (277 ribu anak) di sector pelayanan jasa. Pekerja anak di sektor agrikultur meningkat sebanyak 8.1% sedangkan sektor industri berkurang sebanyak 6.6% dan sektor pelayanan jasa berkurang pula sebanyak 5.1% jika di bandingkan dengan data tahun 2006.

Gambar 2.7 Pekerja anak berdasarkan Sektor tahun 2006-2012



(Sumber: Turkish Statistical Institute)

Kemudian berdasarkan pada data statistic ILO tahun 2008, hampir 60% pekerja anak terlibat dalam aktivitas agrikultur, 25% terlibat dalam pekerjaan di bidang jasa seperti di toko ritel, restoran, semir sepatu, dan sebagainya. Serta 15% sisanya terlibat dalam sector ekonomi informal, usaha kecil, pengoperasian mesin, dan sebagainya. Lebih buruk lagi, selain pada ketiga sector tersebut, juga terdapat anak-anak yang terlibat dalam kegiatan terlarang seperti produksi dan perdagangan obat-obatan. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak di eksploitasi secara ekstrem dalam kegiatan ekonomi.

Gambar 2.8 Pekerja Anak Berdasarkan Sektor dan Aktivitas

Sector/Industry	Activity
Agriculture	Production of cotton, hazelnuts, citrus fruits, sugar beets, cumin, peanuts, and pulses (1-12, 14)
Industry	Production of furniture, bricks,* shoes,* leather goods* (2, 12, 16) Auto repair*† (12, 16)
Services	Street work, including selling facial tissue packets or flowers, carrying bundles in market areas, cleaning car windshields, collecting recyclable materials, and begging (2, 12-14, 16, 20-22)
Categorical Worst Forms of Child Labor‡	Commercial sexual exploitation sometimes as a result of human trafficking (12, 15-17) Used in armed combat by Kurdish militant groups sometimes as a result of forced recruitment* (12, 23-27)

(Sumber: Turkey Moderate Advancement)

Munculnya fenomena pekerja anak di Turki di pengaruhi oleh berbagai factor seperti factor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, dan juga munculnya fenomena ‘upah rendah’ dalam perekonomian Turki selama beberapa decade terakhir. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa keluarga yang bermigrasi dari area pedesaan menuju perkotaan dengan harapan dapat memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik justru mengalami permasalahan tempat tinggal dan pekerjaan sehingga keluarganya terlantar.⁸⁷ Kondisi ini kemudian memaksa anak-anak harus ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Beberapa penelitian menyatakan bahwa pekerja anak di Istanbul dilaporkan berasal dari keluarga yang terlantar karena orang tuanya tidak mendapatkan pekerjaan dan penghasilan sehingga mereka terpaksa harus berhenti bersekolah karena tidak memiliki biaya untuk hal tersebut. Hal serupa juga dilaporkan terjadi di Ankara, dimana sejumlah besar anak-

⁸⁷ Duyan V, *Loc. Cit*

anak usia sekolah bekerja di jalan untuk membantu pendapatan keluarga mereka yang terlanjar.⁸⁸

Faktor selanjutnya yaitu rendahnya tingkat pendidikan orang tua karena tingkat pendidikan orang tua memengaruhi keputusan yang diberikan ketika memutuskan anak-anak untuk terlibat dalam angkatan kerja atau tidak. Berdasarkan pada International Labour Conference, tingkat pendidikan orang tua, khususnya Ibu yang memiliki tingkat pendidikan tinggi memainkan peran yang penting terhadap tingkat pendidikan anak sehingga cenderung akan mengarahkan anak untuk bersekolah daripada bekerja. Hal ini tidak hanya mengurangi probabilitas anak untuk bekerja dan meningkatkan kemungkinan anak untuk bersekolah namun juga memberikan dampak yang positif terhadap kesehatan anak, baik secara fisik maupun psikis.⁸⁹ Sedangkan keluarga dengan tingkat pendidikan orang tua yang rendah cenderung tidak memperhatikan pentingnya pendidikan bagi anak dan justru mendorong anak-anak untuk bekerja karena penghasilan dari pekerja anak biasanya penting bagi kelangsungan hidup rumah tangga.

Bahkan, beberapa keluarga yang tidak berada dalam kemiskinan berpikir bahwa bekerja merupakan hal yang baik bagi untuk pembentukan karakter dan keterampilan perkembangan anak-anak. Hal ini juga dipengaruhi oleh budaya dalam

⁸⁸ Altuntas B. 2003. *Mendile, Simite, Boyaya, Co'pe: Ankara Sokaklarinda Calisan Cocuklar (Dealing Tissue, Simit, Shoeshine, Garbage: Children Working on Ankara Streets)*. Istanbul:iletisim.

⁸⁹ ILO, 2002. "A future without child labour," Geneva, International Labour Organisation.

masyarakat Turki yang beranggapan bahwa dengan bekerja anak laki-laki dapat belajar dan mempraktikkan kehidupan kerja sejak usia dini. Hal ini juga berlaku pada anak perempuan yang didorong untuk menjadi pekerja anak karena dianggap sebagai suatu upaya untuk menjadikan mereka sebagai wanita yang matang.⁹⁰

Munculnya fenomena pekerja dengan upah rendah dalam perekonomian Turki selama beberapa decade terakhir juga menjadi salah satu faktor banyaknya pekerja anak di Turki. Kondisi ini serupa dengan kondisi pasca terjadinya revolusi industri pada abad ke-18 karena kenyataan bahwa sebagian besar perusahaan di industri manufaktur terdiri dari usaha kecil dan menengah dan bisnis ini kurang dalam teknologi tinggi dan memiliki produksi padat karya sehingga muncul kebutuhan terhadap pekerja anak yang dapat di upah secara rendah. Jika ekonomi informal tidak dihilangkan atau setidaknya ukurannya tidak diminimalkan dan usaha kecil serta menengah tidak ditingkatkan untuk menjadi usaha besar dan mengubah produksi mereka dari padat karya menjadi padat modal, maka hampir mustahil untuk menghapuskan pekerja anak di bawah kondisi pasar bebas di mana permintaan dan pasokan produk fleksibel.⁹¹

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa isu pekerja anak di Turki adalah hal yang telah terjadi dalam kurun waktu yang lama. Namun, yang

⁹⁰ Hussain, M. and Maskus, K., 2003. "Child labour use and economic growth: An econometric analysis," *World Economy*, 26, (7), pp.993-1017.

⁹¹ Burcun Dorgan, 2014, *The Potrait of Child Labour in Turkey, Procedia of Economics and Bussiness Adminitration*, 24-25 October 2014

menjadi menarik dalam kasus pekerja anak di Turki terkait dengan pengungsi Suriah adalah bahwa Turki disinyalir memanfaatkan anak-anak pengungsi Suriah untuk menjadi pekerja di Turki yang tentu saja hal ini mengakibatkan respon dari berbagai pihak karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia, Hak Pengungsi, Perlindungan Anak, dan ancaman terhadap *Human Security*.

2.4.2 Pekerja Anak Pengungsi Suriah di Turki

Krisis pengungsi Suriah yang terjadi karena perang saudara mengakibatkan empat dari lima penduduk Suriah diperkirakan hidup dalam kemiskinan dan 7,6 juta orang terlantar.⁹² Berdasarkan data pada tahun 2014, tingkat pengangguran diperkirakan mencapai 57,7%.⁹³ Kondisi ini juga berdampak pada negara-negara tetangga yang menjadi *host country* bagi pengungsi Suriah karena harus menghadapi arus pengungsi sebanyak 4 juta jiwa dimana setengah dari jumlah tersebut adalah anak-anak.⁹⁴ Kehidupan anak-anak Suriah sangat terpengaruh oleh krisis yang terjadi di negaranya. Anak-anak tersebut harus menghadapi kekerasan yang terus meningkat, berbagai serangan seperti tembakan, bom, dan sebagainya sehingga menimbulkan trauma bagi mereka. Anak-anak ini juga harus menanggung beban penderitaan akibat kehilangan keluarga, rumah, dan juga kerabat.⁹⁵

⁹² Key figures UN OCHA, May 2015, www.unocha.org/syria (11/01/19. 18.56)

⁹³ SCPR, '*Alienation and Violence. Impact of Syria Crisis Report 2014*', Syria, 2015, hal. 8

⁹⁴ UNHCR, Syria Regional Refugee Response Statistics, 2015

⁹⁵ *Small Hands Heavy Burden, How the Syria Conflict is Driving More Children into the Workforce*, UNICEF & Save the Children, 2 Juli 2015

Pekerja anak telah menjadi salah satu permasalahan di Suriah sebelum negara tersebut mengalami perang saudara. Namun, krisis kemanusiaan yang timbul akibat perang semakin memperburuk masalah ini. Banyak anak-anak korban perang saudara Suriah yang saat ini terlibat dalam kegiatan ekonomi yang berdampak negatif pada anak baik secara mental, fisik, maupun sosial. Anak-anak tersebut kehilangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan juga keamanan. Hal ini dibuktikan dengan sekitar 2,7 juta anak-anak Suriah telah berhenti dari sekolah dan terpaksa untuk bekerja.⁹⁶ Kondisi ini muncul akibat perekonomian para keluarga pengungsi Suriah yang memburuk karena para orang tua kehilangan pekerjaan mereka di negara asal serta tidak memperoleh pekerjaan di *host country* sehingga anak-anak dan wanita terpaksa ikut andil dalam memperoleh penghasilan demi menunjang keberlangsungan hidup keluarganya. Gelombang pengungsi yang besar dan sedikitnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan juga menimbulkan respon dari masyarakat *host country* yang mengakibatkan ketegangan antara masyarakat local dengan para pengungsi.

Anak-anak dieksploitasi sebagai tenaga kerja murah oleh para majikan yang memanfaatkan kondisi mereka dengan memberikan upah setengah dari upah yang diterima oleh orang dewasa untuk pekerjaan yang sama.⁹⁷ Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak berusia antara sembilan dan 16 bekerja 12 jam sehari dengan upah rendah, dan di bawah ancaman kekerasan fisik.⁹⁸ Berikut adalah data jenis pekerjaan

⁹⁶ *Ibid*

⁹⁷ *Ibid*

⁹⁸ Save the Children, 2015, *Child Protection Assessment north-eastern Syria*

yang dilakukan oleh anak-anak Suriah beserta rata-rata upah yang diterima oleh mereka.

Gambar 2.9 Jenis Pekerjaan dan Upah Pekerja Anak Pengungsi Suriah di Negara

Host Country

Type of work done by children	Typical Wage
Harvesting potatoes in the Bekaa Valley, Lebanon	US\$ 4/day
Street work in Beirut, Lebanon (selling food and drinks, carrying grocery bags, shining shoes, working in parking lots and begging)	US\$ 3-12/day
Illicit work (including prostitution) in Beirut, Lebanon	US\$ 21-36/day
Selling food/drinks on the streets and working in shops and restaurants in Jordan	US\$ 4-7/day
Pushing a wheelbarrow or selling tomatoes in Za'atari refugee camp, Jordan	US\$ 12.4/day
Working as a shoemaker's assistant in Kilis, Turkey	US\$ 7/week

Sources: ILO, UNICEF, Save the Children

(Sumber: ILO, UNICEF, and Save the Children)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa anak-anak pengungsi Suriah di *host country* terlibat pekerjaan yang termasuk dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dengan upah yang kecil. Anak-anak Suriah telah menjadi pemain utama dalam kelangsungan rumah tangga sebagai pencari nafkah parsial, bahkan satu-satunya tulang punggung bagi keluarganya. Turki menjadi salah satu *host country* pengungsi Suriah yang menghadapi permasalahan terkait pekerja anak pengungsi Suriah. Lebih dari 1.182.000 pengungsi Suriah di Turki adalah anak-anak dengan estimasi sekitar 746.000 anak termasuk dalam usia sekolah. Namun, sekitar 400.000-415.000 dari

anak-anak tersebut tidak mendapatkan akses pendidikan sehingga menempatkan mereka pada resiko untuk dipekerjakan, eksploitasi, dan kekerasan.⁹⁹

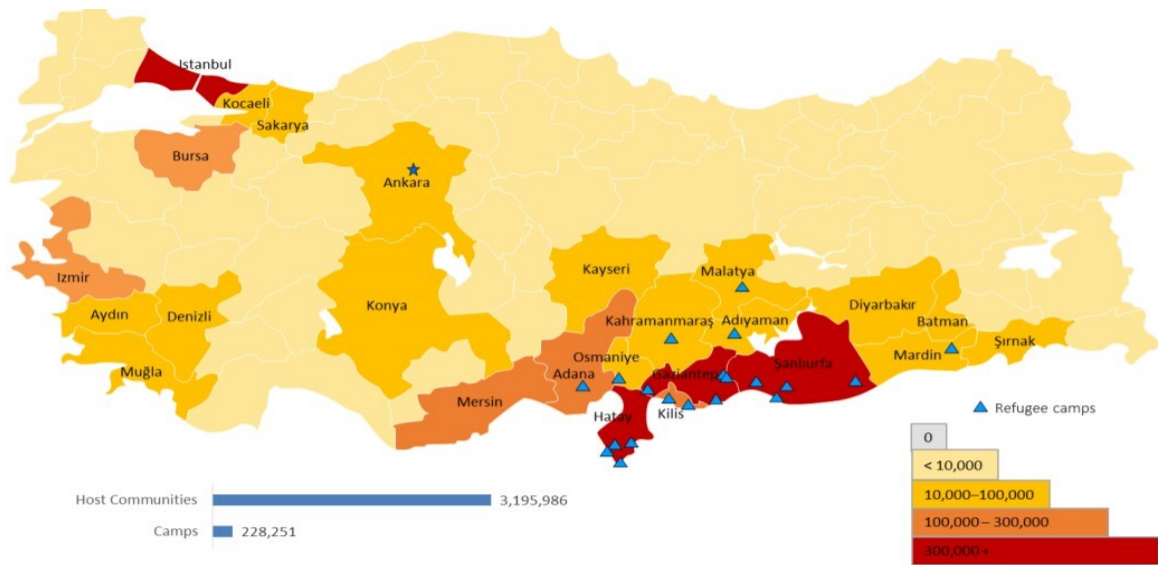
Permasalahan pekerja anak di Turki adalah permasalahan yang berkelanjutan dari generasi ke generasi terutama di sektor ekonomi informal. Meskipun Turki merupakan anggota G20, namun Turki termasuk negara yang paling berisiko dalam distribusi tingkat pendapatan. Hal ini dibuktikan dengan saat ini Turki berada dalam peringkat ke 72 dari 188 negara dalam Indeks Pembangunan Manusia.¹⁰⁰ Hingga saat ini, terdapat hampir 1 juta anak-anak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi di Turki. Jumlah ini terus meningkat dengan adanya arus pengungsi Suriah yang sebagian besar adalah anak-anak. Selanjutnya, berdasarkan pada data penelitian lapangan, anak-anak pengungsi Suriah banyak bekerja di area perkotaan, dimana pekerjaan di area kota sebelumnya di lakukan oleh anak-anak lokal. Sementara itu, anak-anak lokal Turki kini bekerja di area pinggiran dengan resiko pekerjaan yang lebih besar.¹⁰¹ Pekerja anak pengungsi Suriah banyak di temukan di kota-kota yang menjadi *host* bagi pengungsi Suriah seperti Istanbul, Hatay, Şanlıurfa, dan Adana. Berikut data populasi pengungsi Suriah di Turki berdasarkan provinsi.

⁹⁹ Small Hands Heavy Burden, *Loc.Cit*

¹⁰⁰ *Child Labour in Turkey: Situation of Syrian Refugees and the Search for Solutions*, Istanbul Bilgi University Center for Migration research, 11 Maret 2011, Istanbul Bilgi University

¹⁰¹ *Ibid*

Gambar 2.10 Data Populasi Pengungsi Suriah di Turki Berdasarkan Provinsi



(Sumber: UNHCR)

Istanbul kini tercatat sebagai kota yang paling banyak menampung pengungsi Suriah yaitu sekitar 450.000 jiwa. Sebanyak 28% keluarga pengungsi Suriah yang berada di Istanbul menyatakan bahwa anak-anak mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan formal di sekolah sebab anak-anak memiliki peran yang penting terhadap penghasilan keluarga mereka karena mayoritas anak-anak tersebut bekerja di sector tekstil dalam kondisi kerja yang buruk dan rentan mengalami kekerasan.¹⁰² Selanjutnya, berdasarkan penelitian di Hatay dan Şanlıurfa menunjukkan sebanyak 95% pengungsi Suriah bekerja sebagai tenaga kerja tidak terampil sebagai pekerja

¹⁰² *Ibid*

temporer dimana anak-anak ikut berkontribusi pada pendapatan keluarganya. Rata-rata usia anak yang bekerja di Urfa yaitu 14 tahun dan 15 tahun di Hatay.¹⁰³

Sekitar 70 hingga 80% anak-anak setidaknya bekerja selama 6 hari per minggu dan 90% bekerja lebih dari 8 jam per hari.¹⁰⁴ Selain itu, 30% dari anak-anak tersebut mengalami beberapa bentuk kekerasan di tempat kerja serta menderita rasa sakit akibat beban kerja yang berat.¹⁰⁵ Setidaknya terdapat sekitar 40% anak-anak yang bekerja di pekerjaan yang keras dan berbahaya. Kondisi serupa juga terjadi di Adana dimana wanita memiliki akses yang rendah terhadap kegiatan ekonomi sehingga biasanya hanya pria dan anak-anak yang menjadi pencari nafkah. Hanya 20% anak-anak usia sekolah yang mendapat akses terhadap pendidikan sementara mayoritas anak-anak yang tidak bersekolah harus bekerja

Berbagai bentuk kekerasan terhadap pekerja sudah sering terjadi di tempat mereka bekerja. Sebanyak 33% pekerja anak mengaku mereka sering diteriaki dan dimarahi oleh atasan mereka setiap harinya bahkan lebih dari sekali sehari. Salah satu dari mereka dipukuli setidaknya seminggu sekali tanpa alasan. Hal ini mengakibatkan 30% pekerja anak tersebut menderita sakit fisik pada punggung, kaki, mata, dan seluruh tubuh mereka. Sementara itu, 32% dari mereka merasa kelelahan dan sakit yang tidak

¹⁰³ “Türkiye’de Çocuk İşçiliği Sorunu,” [Child Labour in Turkey], Hayata Destek, 11 March 2016, diakses dalam www.hayatadestek.org/media/files/Turkiyede_Cocuk_Isciligi_Sorunu_Suriyed.pdf (13/01/19. 17.01)

¹⁰⁴ *Ibid*

¹⁰⁵ Sezen Yalcin, *Syrian Child Workers in Turkey*, Turkish Policy Quarterly, tersedia dalam http://turkishpolicy.com/article/831/syrian-child-workers-in-turkey#_ftn17 (13/01/19. 18.12)

dapat dijelaskan.¹⁰⁶ Kondisi ini juga dapat mengancam nyawa para pekerja anak. Hal ini dibuktikan dengan *Corporate Murders Report* yang diterbitkan pada tahun 2016 oleh Dewan Kesehatan dan Keselamatan Kerja/ *Worker's Health and Occupational Safety Council* (ISIG) yang menyebutkan bahwa kecelakaan di tempat kerja telah menewaskan sedikitnya 194 pekerja dimana 19 diantaranya adalah anak-anak pengungsi Suriah.¹⁰⁷

2.4.3 Pekerja Anak sebagai Isu *Human Security*

Human Security adalah sebuah konsep yang berkembang dari keamanan tradisional yang berfokus pada negara menjadi pada keamanan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, *human security* melindungi eksistensi anggota masyarakat, termasuk anak-anak, warga sipil, wilayah perang, etnis minoritas dan sebagainya dari berbagai jenis kekerasan yang dapat memberikan ancaman dan rasa tidak aman. Saat ini, perekonomian sebuah negara menjadi salah satu pilar kekuatan nasional yang utama serta indikator keberhasilan pembangunan. Kondisi ini menyebabkan negara-negara di seluruh dunia berlomba-lomba meningkatkan perekonomiannya dan cenderung tidak memikirkan keadaan sumber daya manusia. Hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai permasalahan ketenagakerjaan salah satunya yaitu pekerja anak

¹⁰⁶ Sezen Yalcin, *Loc. Cit*

¹⁰⁷ “2016 yılının ilk beş ayında en az 18, son üç buçuk yılda ise en az 194 çocuk işçi yaşamını yitirdi,” [At least 18 child workers lost their lives in the first five months of 2016, in the last 3,5 years 194 child workers lost their lives], The Workers’ Health and Occupational Safety Council (ISIG), tersedia dalam 2016 www.guvenlicalisma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=17477:2016-yilinin-ilk-bes-ayinda-en-az-18-son-uc-bucuk-yilda-ise-en-az-194-cocuk-isci-yasamini-yitirdi-isig-meclisi&catid=153:cocuk-iscilik&Itemid=242 (16/01/19. 15.12)

yang banyak ditemukan di negara industri seperti di Timur Tengah dan Eropa.¹⁰⁸ Permasalahan pekerja anak merupakan bagian dari isu keamanan manusia (*human security*) dan berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.

Banyak anak-anak di bawah umur yang menjadi objek dalam pelanggaran terhadap hak-hak anak akibat pembangunan ekonomi. Anak-anak yang menjadi pekerja anak kehilangan aksesnya terhadap berbagai hal seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, bermain, dan sebagainya. Selain itu, pekerja anak juga harus menghadapi berbagai ancaman terhadap keselamatan dan kesejahteraannya karena rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan. Berdasarkan pada komponen utama *human security* menurut UNDP seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pekerja anak khususnya dalam kasus ini termasuk dalam komponen keamanan individu (*personal security*) dan keamanan masyarakat. Keamanan individu (*personal security*) bertujuan melindungi orang dari kekerasan fisik baik dari negara maupun sesama individu. Keamanan individu berkaitan dengan ancaman kriminalitas, persepsi individu, dan ketakutan. Misalnya ketakutan akan kehilangan akses terhadap layanan kesehatan atau takut kehilangan pekerjaan.¹⁰⁹ Selain itu juga mencakup ancaman dari negara melalui penyiksaan fisik, ancaman dari negara lain (perang), terorisme, individu atau geng (kekerasan jalanan), kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak-anak

¹⁰⁸ *Facts and figures on child labour*, World Bank, tersedia dalam <http://info.worldbank.org/etools/docs/library/237384/toolkitfr/pdf/facts.pdf> (16/01/19. 17.05)

¹⁰⁹ Shahrbanou Tadjbakhsh and Anuradha M. Chenoy, 2007, *Human Security Concepts and implications*, Canada: Routledge, hlm 14

(pelecehan, prostitusi, pekerja anak), bahkan kekerasan terhadap diri sendiri (bunuh diri atau penyalahgunaan obat-obatan). Dimensi ini umumnya dikaitkan dengan kebebasan dari rasa takut.¹¹⁰

Sedangkan keamanan masyarakat bertujuan untuk melindungi orang dari hilangnya hubungan dan nilai tradisional, serta dari kekerasan sektarian, religi, dan etnis. Oleh karena itu, keanekaragaman budaya yang membentuk masyarakat memerlukan keamanan dari ancaman penindasan dan diskriminasi terhadap kelompok etnis tertentu dan terhadap pengungsi.¹¹¹ Dalam masyarakat tradisional, kelompok etnis dan kepercayaan minoritas sering merasa terancam oleh diskriminasi dan penindasan.

Permasalahan pekerja anak pengungsi Suriah timbul akibat pecah konflik internal dan perang saudara yang terjadi di Suriah sehingga masyarakat sipil harus mengungsi ke negara lain untuk mencari perlindungan. Kondisi ini mengakibatkan orang-orang dewasa kehilangan mata pencahariannya bahkan sebagian besar harta bendanya sehingga jatuh dalam kemiskinan. Hal ini kemudian menjadi penyebab anak-anak harus terlibat dalam kegiatan perekonomian keluarganya demi bertahan hidup. Selain itu, anak-anak pengungsi Suriah sebagian besar juga telah kehilangan akses terhadap pendidikan sehingga mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan formal di sekolah.

¹¹⁰ *Ibid*

¹¹¹ *Ibid*

Berdasarkan pada pemamparan kondisi tersebut dan komponen keamanan individu menurut UNDP, keamanan individu anak-anak pengungsi Suriah terancam akibat kekerasan yang timbul dari dampak perang saudara yang menimbulkan rasa takut serta trauma baik secara fisik dan psikologis. Ditambah dengan kondisi yang mengakibatkan anak-anak pengungsi Suriah terpaksa menjadi pekerja anak dimana hal ini juga termasuk kekerasan terhadap anak dalam komponen keamanan individu. Selain keamanan individu, permasalahan pekerja anak pengungsi Suriah juga menyangkut keamanan masyarakat karena komponen ini menyangkut keamanan dari ancaman penindasan dan diskriminasi terhadap kelompok etnis tertentu dan terhadap pengungsi.

